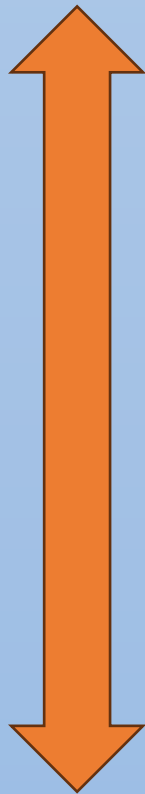


**RANWAL RENJA
TAHUN 2026**



**DINAS SOSIAL
2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	6
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Sosial	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran, Usulan Program dan Kegiatan oleh masyarakat	27
BAB III	28
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3 Progran dan Kegiatan	32
BAB IV	37
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	37
BAB V	46
PENUTUP	46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kita sehingga sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial selama 1 (satu) Tahun ke depan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Sosial merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1(satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang Terencana, Terarah, Terintegrasi dan Berkesinambungan dari setiap Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan pada setiap Tahun Anggaran.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam Pengambilan Kebijakan guna mengurangi Kesenjangan Pelayanan di Bidang Sosial. Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 pada Tahun-tahun berikutnya.

Doloksanggul, 20 Januari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,



FRANS JUDIKA B. PASARIBU, SE.M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19790804 200312 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, forum Perangkat Daerah, pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kebijakan Pemerintah Pusat. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Humbang Hasundutan sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya, dan merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak berkepentingan. Proses penyusunan Rencana Kerja memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rincian mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah yang menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 (lima) tahun. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Sosial menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasis perencanaan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders, selanjutnya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas.

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan itu, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu SKPD teknis yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang ada yaitu melaksanakan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi Program :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun RENJA Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjiwai keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2026. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) Tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Sosial

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

2.5. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD, Usulan Program dan Kegiatan oleh Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengukur suatu aktivitas tertentu baik yang terkait perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan aktivitas. Pada konteks organisasi evaluasi adalah langkah penting dan strategis terutama guna mengukur tingkat pencapaian kinerja kelembagaan baik internal maupun eksternal, dimana hasil rumusan evaluasi pada kelanjutannya dapat menjadi pedoman bagi penentuan kebijakan, strategi dan program organisasi tersebut dimasa yang akan datang.

Seiring dengan berkembangnya era reformasi, tuntutan akan reformasi birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menjadi amanat yang harus dijalankan terutama oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dimana objektifitas pengukuran atas akuntabilitas tersebut dapat ditempuh melalui evaluasi sebagai instrumennya. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Sosial juga perlu untuk mengembangkan mekanisme evaluasi sebagai muatan objektif peningkatan kinerja kelembagaan sebagaimana yang diharapkan bersama, dimana hasilnya akan menentukan pengembangan kebijakan, strategi dan program pembangunan pada urusan sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 yang terkait program, kegiatan dan anggaran sampai dengan Triwulan II belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Catatan-catatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan tahun 2024 masih terus berupaya melakukan pembenahan internal terkait berbagai aspek baik sumber daya manusia, sistem dan prosedur termasuk data dan sarana prasarana penunjang kinerja kelembagaan, termasuk dalam penyusunan berbagai standardisasi pelayanan kinerja kelembagaan.

2. Pelaksanaan pengembangan bidang Sosial yang dilakukan baik secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan maupun yang dilaksanakan secara teknis oleh Pihak Ketiga, dimasa mendatang sangat membutuhkan tingkat sosialisasi yang terencana kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat menumbuhkan kembangkan tingkat kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya atas rasa saling memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan sehingga dapat mendukung terciptanya pola hubungan harmonis dan sinergis antara pelaksana kegiatan dan masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya akan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hasil kegiatan dan efektifitas serta efesiensi.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam tabel T-C.29 di bawah ini :

Tabel :
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Dinas Sosial
 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024
 Kabupaten Humbang Hasundutan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program outcomes/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (Outcomes/k egiatan(Outp ut) Tahun 2026	Realis asi target kinerja hasil progra m dan keluar an kegiat an s/d tahun 2023	Terget dan relaisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target renja perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/ d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2		3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Partisipasi PSKS Dalam Menangani PMKS					#DIV/0!			

1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PSKS yang dibina					#DIV/0!			
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kemampuan PSKS Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota (Tagana)	20	20	20	20	100%	20	20	100%
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kemampuan PSKS Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota (TKSK)	12	11	12	12	100%	11	12	100%
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kemampuan pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (PKH)	34	34	33	33	100%	32	33	97%
4	Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan	1	0	1	1	100%	1	1	100%

		keluarga kewenangan Kabupaten/kota								
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasarnya					#DIV/0!		0	#DIV/0!
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					#DIV/0!		0	#DIV/0!
5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Peraga sesuai debutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	725	489	42	42	100%	150	681	94%
6	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penerima layanan kedaruratan yang ditangani	125	76	15	18	120%	12	106	85%

3	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					#DIV/0!		0	#DIV/0!
7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah data PMKS yang termutakhirkan	10,327	8395	8395	6614	79%	21,8	6614	64046%
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima bimbingan sosial	210	111	34	34	100%	15	160	76%
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penanganan Ekonomi Fakir Miskin					#DIV/0!		0	#DIV/0!

4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Yang Ter Update					#DIV/0!		0	#DIV/0!
9	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fakir miskin yang didata	155.646	13769 4	50000	10703	21%	5.000	153397	99%
10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data fakir miskin yang dikelola	5.000	13769 4	50000	71287	143%	5.000	213981	4280%
11	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	jumlah fakir miskin yang difasilitasi dalam pengembangan bantuan ekonomi	210	111	110	110	100%	30	251	120%
IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam/Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat penanganan pemenuhan pangan dan sandang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1 2	Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana alam/sosial yang mendapatkan bantuan pasca bencana	100	123	100	59	59%	100	282	282%
1 3	Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana alam/sosial yang mendapatkan bantuan pasca bencana	50	69	50	19	38%	50	138	276%
V	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan ASN Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
6	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%	100%
1 4	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan	7	7	7	7	100%	7	7	100%
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan program dan kegiatan	95,00%	95,00 %	95,00%	95,00%	100,00%	95,00%	95,00%	100%

1 5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	22	22	18	18	100%	18	18	82%
1 6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan, jumlah laporan keuangan akhir tahun dan jumlah keuangan semester I dan II	5	5	5	5	100%	5	5	100%
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
1 7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	6	6	6	100%	6	6	100%
1 8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	3	3	3	100%	3	3	100%
1 9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	1	1	1	100%	2	2	100%

20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	6	6	6	100%	6	6	100%
21	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322	322	322	322	100%	322	966	300%
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100%	1	1	100%
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	3	3	2	67%	2	2	67%
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan pemeliharaan	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%

	Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah								
2 5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	5	5	5	100%	5	5	100%
2 6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2 7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15	15	15	15	100%	15	15	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang dapat dijadikan pedoman bagi penentuan kebijakan, strategi dan program dinas di masa yang akan datang.

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Indikator sasaran Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Penanganan PMKS
2. Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS
3. Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal dinas social

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial baik Tujuan maupun Sasaran sesuai dengan tabel dibawah ini.

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	13	14	15
1.	Persentase Penanganan PMKS			80,22 %	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	78,84 %	5,18%	4,01%	3,96%	3,96%	
2.	Indesk Kepuasan PMKS yang ditangani			80%	82%	84%	86%	88%	80%	88,34 %	88,69 %	86%	88%	

3.	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Nilai Evaluasi AKIP			BB	BB	A	A	A	BB	A	A	A	A	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Restra, maka dapat dirumuskan isi-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian Renstra (OPD). Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar bagi PPKS dan penanganan bencana;
2. Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam dan belum terstandar; Keterbatasan infrastruktur sosial yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam penanganan PPKS; Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai penunjang SDM bidang sosial yang menangani langsung permasalahan sosial di masyarakat;
4. Belum optimalnya pemberdayaan sosial dan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi kesempatan berusaha maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan;
5. Dukungan kebijakan alokasi anggaran dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang belum memadai;

Seluruh permasalahan dan tantangan ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada serta memanfaatkan peluang yang tersedia, misalnya :

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya Peran Aktif PSKS dalam menanggulangi PMKS;
3. Adanya regulasi di daerah tentang kesejahteraan sosial;
4. Adanya instansi-instansi pemerintah dan Lembaga masyarakat yang dapat dijadikan mitra dalam memecahkan permasalahan sosial, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjaring informasi seluas-luasnya dari berbagai sumber terkait penanganan masalah di Bidang Sosial;
6. Adanya kesempatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan lain-lain yang disediakan oleh berbagai instansi dan organisasi masyarakat.

Peluang-peluang ini perlu diberdayakan agar program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal. Hal ini telah diupayakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sepanjang Tahun 2021-2024. Terbukti dengan terselenggaranya beberapa kegiatan hingga tingkat capaian 100 %. Kondisi ini dapat dicapai berkat koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan di samping kerja keras para staf Dinas Sosial untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. Kondisi ini perlu terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, agar kinerja yang ditargetkan dapat dipenuhi semaksimal mungkin

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 sudah semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sudah diakomodir. Untuk kondisi Anggaran Tahun 2026 belum sesuai dengan kebutuhan yang ada dan ke depannya tidak terjadi lagi refocusing. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	2.530.055.639	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	2.530.055.639	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	-	-	27.016.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	-	-	27.016.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	27.016.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	27.016.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	-	-	2.072.811.505	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	-	-	2.072.811.505	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.059.096.054	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.059.096.054	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Humbang Hasundutan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	15 Laporan	13.715.451	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Humbang Hasundutan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 Laporan	13.715.451	

			n/Semesteran SKPD								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	-	-	15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	-	-	15.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	15.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	-	-	273.103.134	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	-	-	272.003.134	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.468.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.468.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	87.402.966	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	79.903.366	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	21.396.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	21.396.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.336.168	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.336.168	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Humbang Hasundutan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	148.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Humbang Hasundutan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	154.899.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Humbang Hasundutan	-	-	12.650.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Humbang Hasundutan	-	-	13.750.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Humbang Hasundutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	3.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Humbang Hasundutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4.400.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Humbang Hasundutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.350.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Humbang Hasundutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.350.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Humbang Hasundutan	-	-	129.475.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Humbang Hasundutan	-	-	129.475.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Humbang Hasundutan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	112.860.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Humbang Hasundutan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	112.860.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Humbang Hasundutan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9.775.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Humbang Hasundutan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9.775.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Humbang Hasundutan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.840.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Humbang Hasundutan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.840.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Humbang Hasundutan	-	-	232.386.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Humbang Hasundutan	-	-	232.386.800	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	-	-	232.386.800	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	-	-	232.386.800	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Keluarga	51.500.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Keluarga	51.500.000	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Lembaga	Humbang Hasundutan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga	5 Orang	58.642.800	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Lembaga	Humbang Hasundutan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi	5 Orang	58.642.800	

	Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota			Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	12 Orang	81.570.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	12 Orang	81.570.000	
	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Humbang Hasundutan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	500 Laporan	40.674.000	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Humbang Hasundutan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	500 Laporan	40.674.000	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Humbang Hasundutan	-	-	496.825.200	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Humbang Hasundutan	-	-	496.825.200	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Humbang Hasundutan	-	-	293.149.400	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Humbang Hasundutan	-	-	293.149.400	
	Penyediaan Permakanan	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	100 Orang	154.869.400	Penyediaan Permakanan	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	100 Orang	154.869.400	

			Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Alat Bantu	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	57.188.000	Penyediaan Alat Bantu	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	57.188.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	81.092.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	81.092.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Humbang Hasundutan	-	-	203.675.800	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Humbang Hasundutan	-	-	203.675.800	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	48.310.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	48.310.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Humbang Hasundutan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	60 Orang	155.365.800	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Humbang Hasundutan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	155.365.800	

			dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota								
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Humbang Hasundutan	-	-	305.461.400	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Humbang Hasundutan	-	-	305.461.400	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	-	-	305.461.400	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	-	-	305.461.400	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	193.167.400	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	193.167.400	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	10000 Usulan	112.294.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	10000 Usulan	112.294.000	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Humbang Hasundutan	-	-	336.734.300	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Humbang Hasundutan	-	-	336.734.300	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	-	-	336.734.300	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	-	-	336.734.300	

	Penyediaan Makanan	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	155.365.000	Penyediaan Makanan	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	155.365.000	
	Penyediaan Sandang	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	49.552.000	Penyediaan Sandang	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	49.552.000	
	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Humbang Hasundutan	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	20 Orang	131.817.300	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Humbang Hasundutan	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	20 Orang	131.817.300	
					3.901.463.339					3.901.463.339	

2.5 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran, Usulan Program dan Kegiatan oleh masyarakat

Program/Kegiatan Tahun 2026 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun stake holder lainnya belum ada karena Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2026 belum dilaksanakan.

Tabel :

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volumen	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

1. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
2. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
3. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;

4. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar; Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
5. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
6. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

1. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
2. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Program Nasional yang menjadi prioritas terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yaitu dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan antara lain

kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kebijakan nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik, misalnya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dimana secara tidak langsung pemerintah juga merekrut karyawan dari masyarakat Humbang Hasundutan sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan masih banyak lagi kebijakan Nasional yang mendukung kegiatan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan pokok serta fungsi Pegawai Dinas Sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Adapun Tujuan Akhir yang akan dicapai Dinas Sosial melalui penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Adalah :“
***Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*”.**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Dari masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis. Adapun Sasaran strategis Dinas Sosial diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial tersebut adalah :

1. Penanganan PMKS
2. Peningkatan Kualitas PSKS dalam Penanganan PMKS
3. Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Berdasarkan tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Tujuan	Sasaran	Indikator
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS
	Peningkatan Kualitas PSKS dalam Penanganan PMmKS	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Evaluasi SAKIP

Untuk mencapai Sasaran Dinas Sosial maka dibuat Formula untuk mencapai target Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial. Adapun Formula dapat dilihat pada table berikut :

Tabel :
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN IKU	
			ALASAN DIPILIH	FORMULA
Tujuan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Mengacu pada Permensos nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal)	$\frac{\text{Persentase Penanganan PMKS} \times \text{Indeks Kepuasan PMKS} \times \text{Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial}}{\text{Target yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk 5 Tahun}} \times 100$
Sasaran	Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	

	Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS	Indek Kepuasan Masyarakat	Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat
	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Penangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Mengacu pada Permensos nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Jumlah Kebutuhan dasar korban bencana alam dan Bencana sosial yang dilayani / Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial) X 100 %
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal dinas social	Nilai Evaluasi AKIP	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP OPD oleh APIP Kabupaten Humbang Hasundutan

3.3 Progran dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Penyusunan program dan kegiatan sebagai Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati

Sebagai Penjabaran dari Visi Pemerinta Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu “Mewujudkan Humbang yang maju dan Bermentalitas Unggul” Maka Dinas Sosial berada pada

Misi ke III. yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal.

Dinas Sosial melaksanakan Tujuannya yaitu ***“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”*** dengan Sasaran yaitu:

1. Penanganan PMKS
2. Peningkatan Kualitas PSKS dalam Penanganan PSKS
3. Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

2. Pencapaian SDGS

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SDG’S di sektor Sosial, adalah; Meningkatkan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3. Pengentasan Kemiskinan

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah maksimal, walaupun perlu kerja keras lagi untuk mendapatkan taraf hidup masyarakat yang adil dan makmur.

Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan untuk keluar dari kemiskinan, karena motivasi dari diri sendiri jugalah yang menjauhkan masyarakat dari kemiskinan. Seperti yang kita lihat dari kegiatan Dinas Sosial yang memberikan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Khususnya Penyandang Disabilitas Fisik, Mental dan Lansia Terlantar serta meningkatkan peran aktif PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga Tercapai Tujuan Dinas Sosial Mewujudkan PMKS Mandiri dan Tercapainya Sasaran RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu : Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin

4. Program dan Kegiatan Tahun 2026

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional DINAS SOSIAL adalah penanganan penanggulangan kemiskinan dan PMKS.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				2	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
				3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
				4	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan
				2	Penyediaan Alat Bantu
				3	Pemberian Layanan Kedaruratan
		3	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
				2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan
				2	Penyediaan Sandang
				3	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
		7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
		11		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Ranwal Dinsos Tahun 2024

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2026 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan. Ada 5 Program, 11 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 3.901.463.339,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						3.901.463.339,00							4.161.104.134,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.901.463.339,00							4.161.104.134,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						3.901.463.339,00							4.161.104.134,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.530.055.639,00							2.838.284.034,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.016.000,00				Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan			29.717.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	27.016.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan			29.717.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.072.811.505,00				Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan			2.305.909.101,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	2.059.096.054,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			2.292.193.650,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				15 Laporan	13.715.451,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		13.715.451,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	15.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	273.103.134,00			-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		345.632.333,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	5.468.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			6.515.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	87.402.966,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			149.095.401,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	21.396.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		23.535.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.336.168,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		11.629.272,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	148.500.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		154.856.760,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.650.000,00			-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-	-	14.600.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	3.300.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			4.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.350.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			10.200.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	129.475.000,00			-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-	-	142.425.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	112.860.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		124.146.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9.775.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		10.755.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.840.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			7.524.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	232.386.800,00					-			273.283.700,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	232.386.800,00			-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			273.283.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Keluarga	51.500.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	58.642.800,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		58.642.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				12 Orang	81.570.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		109.640.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial														

			<i>Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti</i>				500 Laporan	40.674.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	496.825.200,00						-		393.202.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	293.149.400,00			-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		-	340.092.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan															
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	154.869.400,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			158.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu															
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				40 Orang	57.188.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			94.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	81.092.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		88.092.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	203.675.800,00			-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		53.110.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	48.310.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		53.110.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	155.365.800,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	305.461.400,00						-	321.467.400,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	305.461.400,00			-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		321.467.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	193.167.400,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		201.467.400,00	DINAS SOSIAL
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

			<i>Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan</i>				10000 Usulan	112.294.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	336.734.300,00						-		334.867.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	204.917.000,00			-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		-	224.867.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan															
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	155.365.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			170.365.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang															
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	49.552.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			54.502.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	131.817.300,00			-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-		-	110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana															
			<i>Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi</i>				20 Orang	131.817.300,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	-			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	JUMLAH							3.901.463.339,00								4.161.104.134,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan yang meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional di bidang sosial. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 tersebut, yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih sering belum sepahaman
4. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya
5. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang Sosial

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan

dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan ini disampaikan sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahun Anggaran 2026. Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja ini pada masa yang mendatang sangat kami harapkan.

Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Doloksanggul, 20 Januari 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,



FRANS JUDIKA B. PASARIBU, SE.M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19790804 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DINAS SOSIAL

Jl. Sisingamangaraja Km. 2,5 Kompleks Perkantoran Pemkab. Humbang Hasundutan

Tano Tubu Kode Pos 22457

Website : <http://dinsos.humbanghasundutankab.go.id>, email :

dinsoshumbanghasundutankab.go.id

DOLOKSANGGUL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 04 TAHUN 2025

T E N T A N G

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

TAHUN 2026

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebagai Penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026;
 - bahwa untuk kelancaraan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 dimaksud perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- 1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial (Renja) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
 - 2. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA :**
- 1. Tim sebagaimana dimaksud pada diktum *KESATU* mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja
 - b. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
 - 2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.
- KETIGA :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 13 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



**FRANS JUDIKA B. PASARIBU,SE.MSi.
PEMBINA TK.I
NIP. 19790804 200312 1 002**

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2026

- I. PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DINAS SOSIAL
- II. KETUA TIM : SEKRETARIS DINAS
- III. WAKIL KETUA :
 - 1. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN BANTUAN SOSIAL
 - 2. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
- IV. SEKRETARIS : FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
- V. ANGGOTA :
 - 1. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 - 2. KASI PELAYANAN SOSIAL
 - 3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



FRANS JUDIKA B. PASARIBU,SE.MSi.
PEMBINA TK.I
NIP. 19790804 200312 1 002

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN 2026

SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Sosial
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD, Usulan Program dan Kegiatan oleh Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

BAB V PENUTUP

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



FRANS JUDIKA B. PASARIBU,SE.MSi.
PEMBINA TK.I
NIP. 19790804 200312 1 002